

QUIS

PILIHAN TEMA/ISU ANALISIS KEBIJAKAN MENGGUNAKAN ANALISIS STAKEHOLDERS (SA)

Berikut adalah beberapa tema pilihan terkait isu analisis kebijakan publik yang relevan untuk dilakukan analisis stakeholders. Tema-tema ini mencakup berbagai bidang dan menyentuh isu-isu penting yang sering melibatkan banyak pihak dengan kepentingan dan pengaruh yang berbeda.

1. **Perubahan Iklim dan Adaptasi Lingkungan:** Kebijakan terkait penanganan perubahan iklim, konservasi lingkungan, dan adaptasi terhadap dampak lingkungan (misalnya, kebijakan pengelolaan lahan gambut atau pengurangan emisi karbon) melibatkan banyak stakeholders seperti pemerintah, LSM lingkungan, perusahaan, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah.
2. **Digitalisasi Layanan Publik:** Transformasi digital dalam layanan publik membutuhkan kolaborasi antar-stakeholders seperti dinas pemerintahan, perusahaan teknologi, masyarakat pengguna, dan lembaga pendidikan yang dapat mendukung pengembangan keterampilan digital.
3. **Pengembangan Kota Cerdas (Smart City):** Kebijakan untuk membangun kota yang berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melibatkan pemerintah daerah, perusahaan teknologi, warga kota, universitas, dan penyedia layanan infrastruktur.
4. **Kebijakan Pendidikan dan Akses Pendidikan Berkualitas:** Peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan di daerah terpencil, dan digitalisasi pendidikan adalah topik yang melibatkan kementerian pendidikan, sekolah, guru, orang tua, organisasi pendidikan, dan perusahaan teknologi pendidikan (edtech).
5. **Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi:** Isu akses air bersih dan sanitasi memerlukan analisis stakeholders dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan pengelolaan air, masyarakat setempat, LSM, dan organisasi kesehatan.
6. **Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan:** Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui praktik pertanian berkelanjutan melibatkan kementerian pertanian, petani, lembaga penelitian, perusahaan agribisnis, organisasi petani, dan konsumen.
7. **Transportasi Berkelanjutan dan Pengurangan Emisi:** Kebijakan untuk transportasi ramah lingkungan yang mengurangi emisi karbon melibatkan kementerian perhubungan, perusahaan transportasi, pengguna transportasi publik, serta perusahaan yang bergerak di sektor energi.
8. **Kesehatan Masyarakat dan Kebijakan Vaksinasi:** Kebijakan vaksinasi dan kesehatan masyarakat, terutama setelah pandemi COVID-19, membutuhkan koordinasi antara kementerian kesehatan, lembaga medis, masyarakat, media, dan perusahaan farmasi.
9. **Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan UMKM:** Mendukung sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal melibatkan dinas perekonomian, komunitas UMKM, lembaga keuangan, platform e-commerce, dan konsumen. Fokus pada kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
10. **Pengelolaan Sampah dan Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan:** Isu pengelolaan sampah, terutama terkait pengurangan sampah plastik, melibatkan pemerintah lokal, perusahaan pengelola limbah, industri plastik, konsumen, dan organisasi lingkungan.
11. **Reformasi Sistem Kesehatan:** Isu tentang perbaikan sistem kesehatan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil atau modernisasi fasilitas medis, melibatkan pemerintah, penyedia layanan kesehatan, masyarakat, dan perusahaan teknologi kesehatan.

12. **Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT):** Peralihan ke energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil melibatkan kementerian energi, perusahaan energi, masyarakat, serta organisasi lingkungan dan riset.
13. **Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan melibatkan kementerian sosial, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, lembaga pemberi bantuan, dan masyarakat penerima manfaat.
14. **Peningkatan Infrastruktur Daerah:** Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung di daerah terpencil melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan konstruksi, masyarakat lokal, dan LSM.
15. **Keamanan Siber dan Privasi Data:** Kebijakan untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi privasi data, terutama di era digital, melibatkan kementerian komunikasi dan informatika, perusahaan teknologi, pengguna internet, serta pakar keamanan siber.
16. **Kebijakan AI dan Otomasi dalam Pekerjaan:** Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi di sektor pekerjaan menimbulkan kebutuhan kebijakan baru terkait dampak terhadap lapangan kerja, hak-hak pekerja, dan keterampilan masa depan. Stakeholders yang relevan termasuk pemerintah, industri teknologi, serikat pekerja, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
17. **Kebijakan Perlindungan Data Pribadi:** Isu ini semakin penting seiring dengan peningkatan penggunaan data digital. Kebijakan perlindungan data mencakup pengaturan privasi, keamanan siber, dan pengawasan data, melibatkan kementerian komunikasi, penyedia layanan digital, masyarakat pengguna, pengembang teknologi, serta aktivis privasi dan hukum.
18. **Kebijakan Ekonomi Hijau dan Transisi Energi Berkelanjutan:** Upaya transisi ke ekonomi rendah karbon, termasuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), semakin menjadi prioritas dalam kebijakan global. Stakeholders yang terlibat adalah kementerian energi, perusahaan energi, masyarakat, investor, komunitas lingkungan, serta peneliti dan pakar teknologi hijau.
19. **Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial dalam Kebijakan Kesehatan:** Peningkatan kesadaran tentang kesehatan mental membuat kebijakan kesehatan mental menjadi isu penting, terutama untuk dukungan psikososial di lingkungan kerja, sekolah, dan komunitas. Stakeholders termasuk kementerian kesehatan, penyedia layanan kesehatan mental, perusahaan, sekolah, LSM, serta masyarakat luas.
20. **Kebijakan Ketahanan Ekonomi dan Keamanan Pangan Pasca-Pandemi:** Pandemi COVID-19 telah menyoroti perlunya ketahanan ekonomi dan keamanan pangan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan rantai pasokan pangan, diversifikasi sumber daya pangan, serta dukungan untuk UMKM dan sektor pertanian. Stakeholders termasuk pemerintah, petani, UMKM, industri pangan, dan konsumen.
21. **Perumahan Terjangkau dan Permukiman Urban:** Kebijakan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak di kota-kota besar semakin mendesak di tengah urbanisasi dan kenaikan harga properti. Stakeholders dalam isu ini termasuk pemerintah daerah, pengembang properti, masyarakat, investor, LSM, serta komunitas urban.
22. **Penanganan Krisis Iklim dan Kebijakan Mitigasi Risiko Bencana:** Dengan meningkatnya frekuensi bencana alam, kebijakan mitigasi risiko bencana menjadi prioritas. Isu ini mencakup adaptasi iklim, pengelolaan bencana, dan perlindungan masyarakat rentan. Stakeholders termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi penanggulangan bencana, LSM, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah.
23. **Regulasi Keamanan Pangan untuk Produk Berbasis Bioteknologi:** Produk pangan yang dihasilkan melalui bioteknologi, seperti tanaman transgenik dan protein alternatif, menimbulkan kebutuhan regulasi terkait keamanan konsumen dan dampak lingkungan.

Stakeholders termasuk kementerian pertanian, lembaga penelitian, produsen bioteknologi, konsumen, serta organisasi kesehatan.

24. **Kebijakan Digital dan Regulasi Ekonomi Kreatif:** Ekonomi digital dan kreatif terus berkembang, dengan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung inovasi, melindungi hak cipta, dan mendorong kewirausahaan. Stakeholders termasuk pemerintah, platform digital, kreator konten, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat umum.
25. **Kebijakan Migrasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran:** Dengan meningkatnya mobilitas global, kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja migran dan penanganan arus migrasi menjadi penting. Stakeholders yang relevan termasuk pemerintah, organisasi buruh internasional, perusahaan perekrutan, pekerja migran, serta LSM yang berfokus pada hak-hak migran.
26. **Kebijakan Pendidikan Lifelong Learning untuk Era Digital:** Pendidikan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat menjadi sangat penting di era digital, yang memerlukan kebijakan terkait akses pendidikan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan baru. Stakeholders termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, pekerja, dan masyarakat umum.
27. **Inisiatif Keberlanjutan di Sektor Pariwisata:** Kebijakan keberlanjutan untuk pariwisata meliputi perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penetapan standar pariwisata berkelanjutan. Stakeholders termasuk kementerian pariwisata, pengusaha pariwisata, komunitas lokal, organisasi lingkungan, dan wisatawan.
28. **Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Limbah Plastik:** Isu sampah plastik memerlukan kebijakan terkait pengelolaan limbah yang lebih ketat dan promosi daur ulang. Stakeholders dalam isu ini termasuk pemerintah daerah, perusahaan plastik, industri pengelolaan sampah, masyarakat, dan LSM lingkungan.
29. **Keamanan Finansial Digital dan Perlindungan Konsumen:** Dengan pertumbuhan layanan keuangan digital, kebijakan terkait keamanan finansial dan perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Stakeholders yang terlibat adalah bank digital, regulator keuangan, pengguna, pengembang teknologi finansial (fintech), dan pakar keamanan siber.
30. **Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Infrastruktur Hijau:** Kebijakan untuk mendukung infrastruktur hijau dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan mencakup penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengembangan area hijau. Stakeholders yang terlibat adalah pemerintah daerah, pengembang infrastruktur, LSM, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan.
31. **Pengaturan Cryptocurrency dan Aset Digital:** Pertumbuhan cryptocurrency dan aset digital membutuhkan kebijakan regulasi untuk melindungi konsumen dan mengurangi risiko keuangan. Stakeholders meliputi pemerintah, bank sentral, pelaku pasar aset digital, pengguna, dan investor.
32. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Program Penghasilan Dasar Universal (Universal Basic Income):** Dengan meningkatnya ketimpangan ekonomi, konsep penghasilan dasar universal (UBI) mulai dilihat sebagai solusi. Stakeholders dalam isu ini adalah pemerintah, organisasi buruh, lembaga keuangan, kelompok masyarakat rentan, serta masyarakat luas.

Dosen PJ

Prof. Novita Tresiana